

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP
PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR UNTUK
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DITINJAU
MENURUT KONSEP *IḤYĀ' AL-MAWĀT*
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAUQAS RAHMATILLAH

NIM. 180102107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP
PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR UNTUK
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DITINJAU
MENURUT KONSEP *IḤYĀ' AL-MAWĀT*
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SYAUQAS RAHMATILLAH

NIM: 180102107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


Azka Amalia Jihad, M.El
NIP. 199102172018032001

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP
PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR UNTUK
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DITINJAU
MENURUT KONSEP *IHYA' AL-MAWAT*
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Juni 2023 M
1 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Arifin Abdullah, S.K.H., M.H.
NIP. 198203212009121005

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kurniawati, M. Sh.
NIP. 19780912009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Syauqas Rahmatillah
NIM : 180102107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2023

Yang menyatakan,



Syauqas Rahmatillah

ABSTRAK

Nama : Syauqas Rahmatillah
NIM : 180102107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Pemanfaatan Lahan Terlantar Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep *Ihyā' al-Mawāt*
Tanggal Sidang : 20 Juni 2023 M/1 Dzulhijjah 1444 H
Munaqasyah : 75 Halaman
Tebal Skripsi : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing I : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Pembimbing II : Lahan Terlantar, Peran Dinas, *Ihyā' al-Mawāt*
Kata Kunci :

Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya terdapat sejumlah persil lahan yang dilerantarkan sehingga dipenuhi semak belukar, padahal lahan-lahan tersebut termasuk lahan yang potensial untuk sektor pertanian karena terletak di kaki perbukitan *Glee Pang Wod* dan berdekatan dengan permukiman penduduk, penelantaran lahan produktif tersebut bertentangan dengan konsep *ihyā' al-mawāt* dalam fiqh muamalah yang menganjurkan pemanfaatan pada lahan-lahan produktif karena berkaitan erat dengan kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor apa yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Bandar Baru menelantarkan lahan-lahan produktif? Peran apa saja yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya selaku otoritas yang paling terkait untuk mendorong pemanfaatan lahan terlantar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Bandar Baru? Bagaimana Peran yang dijalankan Dinas Pertanian dan Pangan ditinjau menurut perspektif *Ihya' al-Mawat*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif-deskriptif* dengan pendekatan *normative-sosiologis*, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya penelantaran lahan disebabkan keterbatasan Modal dan Penguasaan lahan yang masih berorientasi sebagai aset Investasi, menurunnya produktivitas kakao dan masifnya Imigrasi masyarakat pemilik lahan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lahan secara optimal. Sementara itu peran-peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya dalam mendorong pemanfaatan lahan terlantar ada tiga yaitu *Pertama*, Peran Pengadaan Modal dan Sarana-Prasarana. *Kedua*, Peran Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *Ketiga*, Peran Dalam Penyuluhan dan Pendampingan. Kesimpulannya Peran-peran dari Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar di Kecamatan Bandar Baru adalah relevan dengan konsep dan tujuan konsep *ihyā' al-mawāt* dalam fiqh muamalah, implikasi peran-peran Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya juga terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat Bandar Baru dan serta efektif berimplikasi pada meningkatkannya motivasi, *ghirah* (semangat) dan kepercayaan diri masyarakat untuk menghidupkan kembali lahan-lahan terlantar, dan juga kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif dengan peningkatan taraf hidup dalam pemenuhan pangan rumah tangga dan efektivitas pengelolaan lahan secara optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمِنَ الْوَالِدِ، أَمَّا بَعْدُ

Rasa puji beserta syukur penulis panjatkan keharibaan Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat & Inayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Pemanfaatan Lahan Terlantar Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep *Ihyā’ al-Mawāt* (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Kabupaten Pidie Jaya)”**.

Tidak lupa pula Shalawat & Salam penulis sanjungkan kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta Keluarga dan Sahabat beliau yang telah membimbing kita ke Alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Alm. Abinda H. Zulkifli Thaib dan Ibunda Faridah Daud yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran, serta kepada Abang, Kakak dan Adik beserta Keluarga Besar penulis yang sudah memberikan dukungan motivasi, dan doa selama ini sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini,
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat kepada dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh Narasumber & Informan dari Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Kabupaten Pidie Jaya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bandar Baru, serta Tokoh dan Masyarakat di Kecamatan Bandar Baru yang telah membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Para sahabat serta kawan-kawan HES 2018 & KPS-FSH UIN Ar-Raniry yang telah memberikan doa, saran dan dukungan kepada penulis.
8. Para sahabat serta kawan-kawan dari GRUP PALESTINE & Asrama Mahasiswa Pidie (AMPI) Banda Aceh yang senantiasa memberikan bantuan doa, dukungan moril, serta motivasi kepada para penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

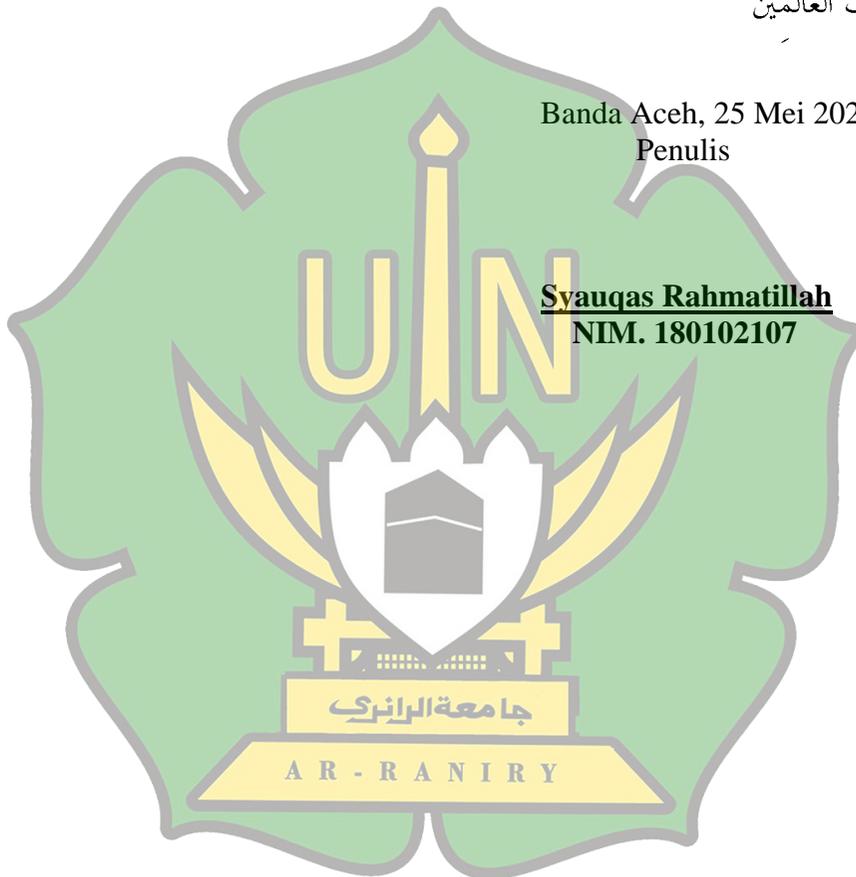
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua.

آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Banda Aceh, 25 Mei 2023

Penulis

Syauqas Rahmatillah
NIM. 180102107



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ظ	Ẓād	Ẓ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

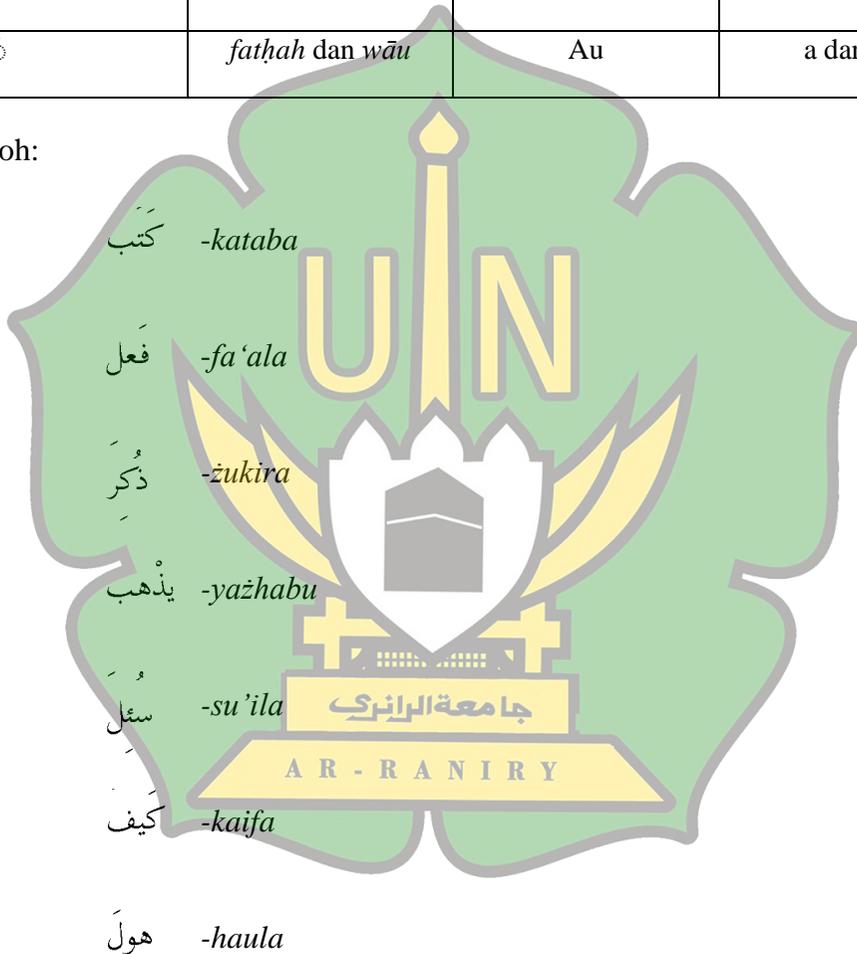
Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٰٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٰ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

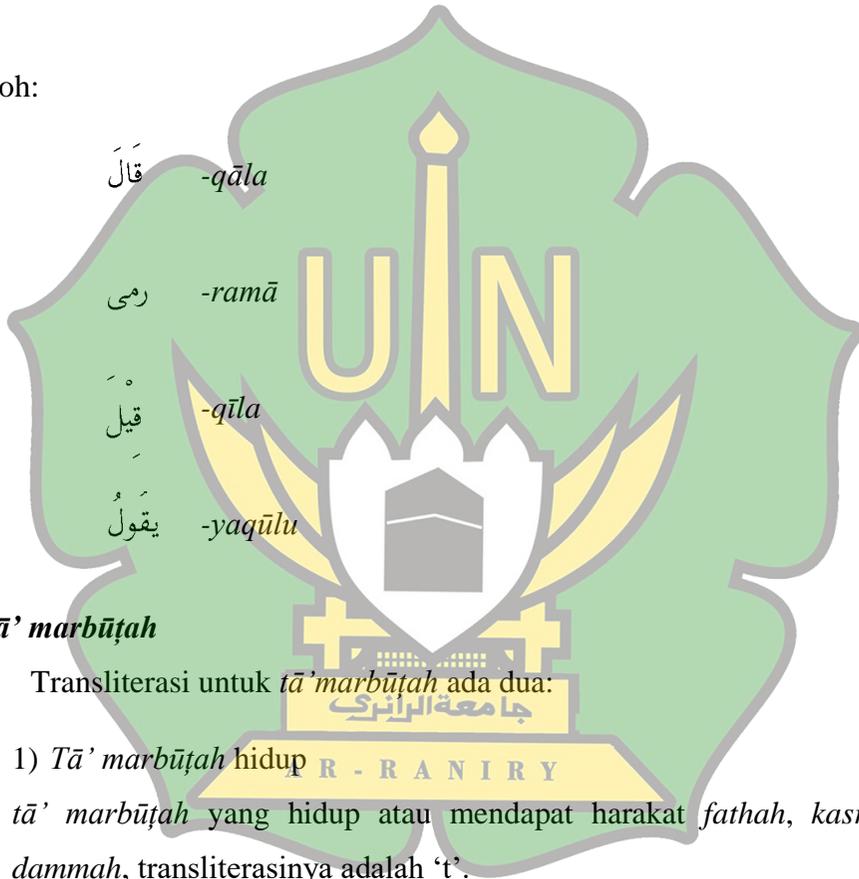


3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:



4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup R - RANIRY
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال - *raud'ah al-atfāl*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *-rabbanā*

نزل - *-nazzala*

البر - *-al-birr*

الحج - *-al-ḥajj*

نعم - *-nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارجل -ar-rajulu

اسيدة -as-sayyidatu

اشمس -asy-syamsu

القلم -al-qalamu

البديع -al-badī'u

الخالل -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُكِّئَ مَبَارَكًا -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-*

Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

AR - RANIRY

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Data Penggunaan Lahan Non-Sawah Kecamatan Bandar Baru ...	45
Tabel 3.2	: Daftar Kelompok Tani dan Pemanfaatan Lahan Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru	64
Tabel 3.3	: Daftar Kelompok Tani dan Pemanfaatan Lahan Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru	65
Tabel 3.3	: Daftar Kelompok Tani dan Pemanfaatan Lahan Gampong Lancang Kecamatan Bandar Baru	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Penelitian
Lampiran 3 : Surat Konfirmasi Penelitian
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara dan Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA KONSEP <i>IHYĀ' AL-MAWĀT</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian <i>ihyā' al-mawāt</i> dan Dasar Hukumnya	21
B. Syarat-syarat <i>ihyā' al-mawāt</i>	29
C. Cara Penerapan <i>ihyā' al-mawāt</i>	31
D. Pandangan Fiqaha tentang Pemanfaatan Lahan Terlantar dengan konsep <i>ihyā' al-mawāt</i>	34
E. Kepemilikan dan Efektivitas Pemanfaatan Lahan dalam Islam	39
BAB TIGA UPAYA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA UNTUK PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR DI KECAMATAN BANDAR BARU DALAM TINJAUAN KONSEP <i>IHYĀ' AL-MAWĀT</i>	
A. Gambaran Umum Persebaran Lahan di Wilayah Kecamatan Bandar Baru dan Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya	44
B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Lahan Terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru	48
C. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar di Kecamatan Bandar	

Baru	53
D. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya terhadap pemanfaatan Lahan Terlantar ditinjau menurut konsep <i>ihyā' al-mawāt</i>	67

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki fungsi strategis dan vital bagi negara dan masyarakat sebagai bagian dari wilayah otoritas suatu kekuasaan dan kedaulatan serta menjadi tempat tinggal dan domisili. Selain itu fungsi tanah menjadi sumber mata pencaharian seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan lain-lain. Fungsi tanah ini harus dilakukan secara aktif sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menyatakan bahwa “*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”.¹ Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan serta merta hanya untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Namun pada realitanya sampai saat ini penelantaran terhadap lahan-lahan produktif masih terus terjadi dan menjadi masalah klasik di berbagai daerah di Tanah Air. Hal ini menjadi ironis karena pada era globalisasi dewasa ini, kebutuhan terhadap lahan-lahan produktif sebagai sarana untuk pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional semakin tinggi.

Secara konseptual, penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, juga bersifat kontra-produktif karena menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi dari tanah, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban *fungsi sosial* yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah.²

¹ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

² Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar”, *Jurnal Dinamika Hukum* vol .10 No 1 Januari (2010) Hlm. 52

Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan khususnya sektor pertanian, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial³

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut, merupakan landasan konstitusional yang menegaskan tanggung jawab kepada penyelenggara pemerintahan dalam bidang pertanahan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Rumusan Pasal tersebut, juga mengandung arti bahwa kewenangan mengelola dan mengatur tanah dalam bidang hukum publik dalam hukum pemerintahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Yudhi Setiawan menjelaskan “Kekuasaan hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik terutama dalam hukum administrasi pemerintahan, kekuasaan hukum menunjuk kepada wewenang Pemerintah Pusat dan diatur dalam norma pemerintahan”⁴

Islam sebagai suatu ajaran yang komprehensif menyukai manusia berkembang dan juga memanfaatkan sektor Sumber Daya Alam dengan baik dan optimal oleh karena itu dalam *fiqh muamalah* dikenal adanya konsep *ihyā' al-mawāt*.⁵ *Ihyā' al-Mawāt* memiliki sendiri secara etimologi berasal dari 2 kata yaitu: kata *ihyā'* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup, sementara *al-Mawāt* berarti sesuatu yang tidak bernyawa(mati) atau lahan yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. Sementara itu *ihyā' al-mawāt* secara terminologi *fihiyyah* dapat diartikan dengan menghidupkan atau memproduktifkan kembali lahan terutama yang tidak diketahui pemiliknya dan

³ *Ibid* Hlm. 53

⁴ Yudhi Setiawan, *Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) hlm. 10

⁵ Masdar F. Mas'udi (ed), *Teologi Tanah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), Hlm.92

belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, baik untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya.⁶

Ihyā' al-Mawāt bertujuan agar tanah atau lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada manusia secara luas. Indikasi yang menunjukkan adanya *ihyā' al-mawāt* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk lahan pertanian dan perkebunan, tanah tersebut dicangkul, diberi pupuk, dan di tanami buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Dan jika tanah tersebut diperlukan untuk bangunan, maka didirikan bangunan dengan sebagai penunjangnya.⁷

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya terdapat beberapa persil lahan yang tidak diproduktifkan bahkan sebagian ada yang sudah dipenuhi dengan semak belukar seperti yang terdapat terdapat di Gampong Paru Keude, Gampong Paru Cot, dan Gampong Lancang di sekitar areal Jalan Banda Aceh-Medan yang berdekatan dengan kawasan Perbukitan *Glee Pang Wod*. Namun sejauh pengamatan penulis lahan-lahan tersebut memiliki batas yang jelas batas yang jelas.

Menurut laporan penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 disebutkan bahwa total luas lahan terlantar di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 6051 hektar, sementara itu di luas lahan terlantar yang ada di dalam wilayah Kecamatan Bandar Baru ada sebanyak 1891 hektar.⁸ Untuk di wilayah Gampong Paru Keude, Paru Cot dan Lancang sendiri luas lahan terlantar sekitar 412 hektar.⁹

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar at, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014) Hlm. 403

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pratama, 2018), hlm. 45

⁸ Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya, *Data Laporan Penggunaan Lahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022*

⁹ Data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

Murniah penyuluh pertanian wilayah Gampong Paru Keude, Paru Cot, dan Lancang membenarkan adanya lahan terlantar di kawasan ini, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran lahan-lahan tersebut sebagian besar disebabkan kekurangan modal dari pemilik lahan sehingga lahan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, banyaknya imigrasi keluar daerah, kurangnya pengetahuan pemilik lahan terhadap kondisi tanah dan perawatan komoditas yang sedang ditanam sehingga menimbulkan kerugian.¹⁰

Keberadaan lahan terlantar yang ada di Gampong Paru Keude, Gampong Paru Cot, dan Gampong Lancang merupakan bukti bahwa masih adanya tanah-tanah terlantar di Kecamatan Bandar Baru. Apabila Pemerintah mampu mendorong pemanfaatan lahan-lahan produktif tersebut untuk sektor pertanian, maka lahan-lahan tersebut tentu akan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat untuk membuka peluang peningkatan taraf hidup masyarakat dan juga penguatan ketahanan pangan bagi Kabupaten Pidie Jaya.

Sektor pertanian termasuk sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu pengembangan dan juga pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi setiap pemerintah daerah.

Pada dasarnya peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya selaku otoritas yang berwenang dalam mendorong pemanfaatan lahan terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru, peran tersebut memang sangat di butuhkan selain karena terbatasnya waktu dan tenaga serta dana, masyarakat juga mengaku kurang memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan tanah terlantar tersebut secara optimal dan juga tepat sasaran.

Kegiatan menghidupkan lahan terlantar tersebut memang merupakan kegiatan yang sangat mulia disisi Allah Swt karena menjalankan salah satu syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk terwujudnya kemaslahatan kolektif, terlebih manfaat

¹⁰ Wawancara dengan Murniah, Penyuluh Pertanian Gampong Paru Keudee, di Kantor BPP Bandar Baru pada 1 Agustus 2022

lahan terlantar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh manfaatnya saja dalam aspek lingkungan yang semakin subur, akan tetapi juga memiliki dampak terhadap aspek pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan ketersediaan serta ketahanan berbagai macam barang kebutuhan pokok, seperti; pangan, sandang, papan dan juga peningkatan taraf hidup baik peningkatan pendapatan dan kebutuhan sehari-hari, penambahan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kemanusiaan dan juga sosio kultural untuk menumbuhkan jati diri masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta dan dinamika yang ada diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut persoalan yang terjadi tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **“Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Pemanfaatan Lahan Terlantar Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep *Ihyā’ al-Mawāt* (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penelantaran lahan produktif dalam wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya?
2. Bagaimana peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya terhadap lahan terlantar dan pemanfaatannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat masyarakat Kecamatan Bandar Baru ditinjau menurut konsep *Ihyā’ al-Mawāt*?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Ihyā’ al-Mawāt* terhadap peran Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya dalam pemanfaatan lahan terlantar di kecamatan Bandar Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Faktor-faktor penelantaran lahan produktif dalam wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

2. Mengetahui Peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya terhadap lahan terlantar dan pemanfaatannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat masyarakat Kecamatan Bandar Baru dilihat menurut konsep *Ihyā' al-Mawāt*
3. Mengetahui Tinjauan konsep *Ihyā' al-Mawāt* terhadap peran Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya dalam pemanfaatan lahan terlantar di kecamatan Bandar Baru.

D.Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah rangkuman yang diambil dari sumber bacaan atau penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Kajian Pustaka mempunyai fungsi sebagai rujukan yang dapat pembeda oleh penulis di masa yang akan datang.

Kajian mengenai tentang *ihyā' al-mawāt* bukanlah suatu hal yang baru, baik dalam bentuk skripsi, artikel, kajian khusus, jurnal penelitian dan lain sebagainya, namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Pemanfaatan Lahan Terlantar berdasarkan penelusuran penulis belum pernah ada penelitian yang serupa, adapun penelitian tentang konsep *ihyā' al-mawāt* antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ifroh Fitria yang berjudul *Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)* dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang penggunaan tanah mati yang harus memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendapat menggunakan lahan tersebut baik menurut Imam Abu Hanifah maupun menurut UUPA. Kesimpulan penelitian ini adalah hubungannya

dengan Ihyaul mawat dengan Pasal Pokok Agraria adalah saling terkait satu sama lain. Terutama tentang perizinan *Ihya' al-Mawat*¹¹

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis lakukan adalah pada objek yang dikaji, yaitu pada penelitian ini yang diteliti adalah UUPA 1960 dalam hukum positif Indonesia dan keterkaitannya dengan konsep menghidupkan lahan mati (*Ihya' al-Mawat*) menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan penulis dalam karya objek penelitiannya adalah Peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Bandar Baru menurut tinjauan konsep *ihya' al-mawat*

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Maulida Rizki yang berjudul *Pemberdayaan Lahan Tidur Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ihyā' al-Mawāt* dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. hasil penelitian ini adalah Perizinan pada pemberdayaan lahan tidur dibawah binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan *ihyā' al-mawāt* sehingga memadai syarat keabsahan pemberdayaan lahan, sedangkan pemberdayaan lahan yang dilakukan masyarakat yang tanpa adanya proses perizinan tidak memenuhi syarat keabsahan dalam penggunaan lahan mati, Tinjauan konsep *ihyā' al-mawāt* pada lahan tidur di wilayah kota Banda Aceh ialah lahan tersebut termasuk dalam kualifikasi tanah terlantar yang dapat dihidupkan asal sesuai dengan syarat dan cara *ihyā' al-mawāt*¹²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu pada penelitian diatas lebih fokus mengkaji tentang keabsahan perizinan pemanfaatan lahan tidur/terlantar di wilayah Kota Banda Aceh, sedangkan kajian penulis berfokus pada peran yang dijalankan Dinas Pertanian dan Pertanian Pidie Jaya terhadap

¹¹ Ifroh Fitria, *Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria* (UU No. 5 Tahun 1960, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017

¹² Maulida Rizki, *Pemberdayaan Lahan Tidur Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ihyā' al-Mawāt*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

pemanfaatan lahan terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya menurut tinjauan konsep *ihyā' al-mawāt*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Teuku Ridho Caesar Afrian yang berjudul *Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif Ihya' Al Mawat (Studi Kasus Di Kota Meulaboh)* dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021, Kesimpulan penelitian ini adalah Kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat yang tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami di Kota Meulaboh bisa dikatakan tidak cocok menurut perspektif konsep *Ihya' al-Mawat* dalam Fiqh Muamalah karena alasan-alasan yang digunakan Pemkab Aceh Barat tidak relevan terhadap kemaslahatan masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu penelitian diatas penulis mengkaji tentang kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Aceh Barat dalam merespon lahan terlantar bekas bencana Tsunami 2004 yang ada di wilayah Kota Meulaboh, sedangkan penelitian yang penulis kajiobjek penelitiannya adalah peran yang dijalankan Dinas Pertanian dan Pertanian Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan-lahan yang ditelantarkan oleh masyarakat ada di wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya menurut tinjauan *Ihyā' al-Mawāt*.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Joni Bin Asnawi mengenai “Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep *Ihyā' al-Mawāt*” dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016, pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang praktik masyarakat, kebijakan adat dan tinjauan hukum islam dalam pemanfaatan tanah Negara di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Menurut Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh terdapat aturan-aturan

¹³ Teuku Ridho Caesar Afrian, *Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif Ihya' Al Mawat (Studi Kasus Di Kota Meulaboh)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

tersendiri yang mengatur tentang mengenai hal tersebut menurut hukum Islam. Aturan tersebut menjelaskan bahwa siapa yang menguasai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu penelitian diatas mengkaji tentang praktek pemanfaatan DAS Krueng Aceh yang dilakukan yang ada di Kecamatan Krueng Barona Jaya, sedangkan penelitian yang penulis mengkaji peran yang dijalankan Dinas Pertanian dan Pertanian Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan-lahan yang ditelantarkan oleh masyarakat ada di wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya menurut tinjauan *Ihyā' al-Mawāt*.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syarbaini yang berjudul *Konsep Ihyā' al-Mawāt menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan* dari STIS Al-Hilal Sigli Aceh tahun 2022. Kesimpulan penelitian ini *ihya' al-mawat* adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Dasar hukum *Ihya' al-Mawat* didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan juga sejalan dengan Bunyi pasal 33 ayat 3 UUD RI : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹⁴

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis kaji yaitu pada penelitian diatas penulis mengkaji UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan menurut perspektif *Ihya' al-Mawat* sedangkan kajian penulis berfokus pada peran yang dijalankan Dinas Pertanian dan Pertanian Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.

¹⁴ Ahmad Syarbaini, “*Konsep Ihyā' al-Mawāt menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan*” Jurnal HEI EMA, Vol. 1 No. 2, (2022)

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munif yang berjudul *Ihyā' al-Mawāt dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia* dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam peraturan atau regulasi pertanahan di Indonesia terdapat tiga jenis tanah yang termasuk kategori tanah *al-mawāt*. Tanah tersebut ialah adalah tanah terlantar, tanah reklamasi, dan tanah timbul.¹⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu pada penelitian diatas penulis mengkaji eksistensi konsep *Ihya' al-Mawat* dalam hukum agraria nasional, sedangkan penelitian yang penulis kaji berfokus pada Peran Dinas Pertanian dan Pertanian Pidie Jaya terhadap upaya mendorong pemanfaatan lahan-lahan terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya menurut tinjauan *Ihyā' al-Mawāt*.

Berdasarkan sumber kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait *ihyā' al-mawāt* sudah pernah ada sebelumnya namun penelitian tentang *Ihya' al-Mawat* di Kabupaten Pidie Jaya belum pernah ada, selain itu perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini fokus mengkaji Peran-peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan-lahan terlantar guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Bandar Baru menurut konsep *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati) dalam fiqh muamalah.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁶ Sementara Menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang

¹⁵ Ahmad Munif, "*Ihyā' al-Mawāt dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*" Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.20, No. 1 (2018)

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984) hlm. 735

berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang mempunyai definisi “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

2. Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁸

3. Pemanfaatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.¹⁹

4. Lahan Terlantar

Lahan terlantar adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun sering juga dikenal dengan lahan tidur. Lahan terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto, ” *Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 212-213

¹⁸ <https://pertanian.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> diakses pada 4 Agustus 2022

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.711

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.²⁰

5. Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik²¹

6. Taraf Hidup

Peningkatan secara etimologi adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Menurut KBBI, peningkatan adalah “proses, cara, atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya”.²² Selanjutnya menurut Adi. S, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.²³

7. Masyarakat

Menurut M.J. Herskovits masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan

²⁰ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Jakarta. (Pasal 4 angka 1)

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga* (Jakarta; Balai Pustaka, 2015) hlm. 252

²² Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002) hlm. 160

²³ <http://Www.Duniapelajar.Com/pengertian-Peningkatan-Menurut-Para-Ahli.Html> diakses pada 4 Agustus 2022

menurut JL. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Semenata S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.²⁴ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang berdekatan dan terkait dengan lahan-lahan terlantar.

8. *Ihyā' al-Mawāt*

Ihyā' al-Mawāt adalah dua lafal kata yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. secara literer *ihya'* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari *maut* yang berarti mati atau wafat.²⁵ *Ihyā' al-Mawāt* bermakna menghidupkan tanah-tanah mati atau tidak dimanfaatkan dengan menyuburkan dan menanaminya.

Ihyā' al-Mawāt yang penulis maksud dalam penellitian inui adalah menghidupkan lahan-lahan terlantar yaitu lahan tanah hak milik perorangan yang tidak didayagunakan menjadi tanah yang produktif yang dapat menghasilkan manfaat bagi pengelola atas tanah tersebut.

F. Metode Penelitian

²⁴ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 137

²⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.265

Metode penelitian adalah suatu proses dimana suatu cara (teknik) yang dilakukan oleh peneliti dimana dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Di dalam melakukan sebuah penelitian harus mempunyai data-data yang lengkap faktual, dan objektif agar penelitiannya dapat tersusun secara sistematis dan juga terstruktur. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Normatif-Sosiologis* . Dengan pendekatan ini maka penulis akan melihat peran yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar di Kecamatan Bandar Baru dan juga melihat implikasi peran-peran tersebut terhadap masyarakat setempat kemudian meninjau dengan konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam fiqh muamalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif*. Kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada fenomena sosial yang berkaitan erat dengan opini dan juga persepsi dari pihak ataupun masyarakat yang terlibat. Sedangkan *deskriptif* adalah penelitian untuk menggali dan memaparkan fenomena yang dikaji secara apa adanya sesuai dengan tema yang akan dipaparkan.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya dan Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.

4. Sumber Data

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 93

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya, dimana terdiri dari informan Intansi terkait dari masyarakat setempat. baik melalui wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Kabupaten Pidie Jaya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bandar Baru dan juga masyarakat Kecamatan Bandar Baru, serta observasi lapangan maupun dalam bentuk data laporan yang dimana akan di reduksi oleh penulis.

b. Data sekunder,yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen resmi, buku-buku artikel,dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data dapat bersifat fatal dan berakibat terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.²⁷

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*Library Research*)

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan terhadap permasalahan sebenarnya.²⁸ Pengumpulan data lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi lapangan, dalam hal ini penulis meneliti langsung dan

²⁷ Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif komunikasi Ekonomi dan Kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.123

²⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media ,2005), hlm.34

bertanya kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Kabupaten Pidie Jaya dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bandar Baru tentang bagaimana Peran yang dijalankan dalam mendorong pemanfaatan terhadap lahan-lahan produktif terlantar yang ada di kawasan Kecamatan Bandar Baru. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan cara wawancara dan dokumentasi.

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian yang ditempuh oleh penulis dengan cara membaca dan mengumpulkan informasi dari buku-buku, berbagai literatur seperti jurnal, makalah, majalah dan juga artikel di internet serta sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan adalah merupakan suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data-data adalah langkah yang sangat penting dari suatu penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian²⁹. Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan dalam rangka untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses, teknik pengumpulan data dengan observasi bererkaitan dengan perilaku dari individu atau kelompok, sistem kerja, gejala-gejala sosial atau alam dan juga responden yang diamati dengan skup yang tidak terlalu besar. Sehingga melalui metode ini penulis dapat secara langsung melakukan

²⁹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63

pengamatan ke tempat-tempat objek yang diteliti seperti Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya, Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bandar Baru dan juga menemui langsung tokoh masyarakat dan juga masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Bandar Baru untuk mengetahui langsung mengenai tentang Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam upaya pemberdayaan lahan terlantar dan juga untuk mengetahui persepsi mereka dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik dimana pengumpulan data yang didapat dengan cara langsung bertanya kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Dalam penulisan ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam masalah ini yang menjadi narasumber merupakan langsung kepada pihak terkait dari Dinas Pertanian & Pangan (Distanpang) Kabupaten Pidie Jaya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bandar Baru, Tokoh Masyarakat kecamatan Bandar Baru, masyarakat Kecamatan Bandar Baru Masyarakat pemilik lahan yang tidak memanfaatkan lahan dan juga yang sudah memanfaatkan lahan yang tergabung dalam Kelompok Tani(Poktan) binaan Dinas Pertanian Pertanian dan Pangan Pidie Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dipublikasikan untuk kepentingan umum. Data ini dapat berupa program yang telah dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya dalam bentuk paper, foto lapangan, rekaman audio, dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, setelah semua data terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam analisis pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a) *Penyuntingan*, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban data.
- b) *Analisis*, kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

8. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 – Nomor 0543 b/U/1987. Sedangkan terjemahan ayat-ayat suci Al-Qur'an penulis kutip dari kitab Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun pembagian-pembagian dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan membagi ke dalam 4 (empat) bab dan juga terurai dalam berbagai sub bab sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab dua ini membahas tentang konsep *ihya' al-mawat* dalam fiqh muamalah yang mencakup tentang pengertian *ihyā' al-mawāt* dan dasar hukumnya, syarat-syarat *ihyā' al-mawāt*, cara penerapan *ihyā' al-mawāt*, pandangan fuqaha tentang Pemanfaatan Lahan Terlantar dengan konsep *ihyā' al-mawāt*, kepemilikan dan efektivitas pemanfaatan lahan dalam Islam.

Bab tiga, pada bab tiga ini menjelaskan hasil penelitian Upaya Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya untuk pemanfaatan lahan terlantar di kecamatan bandar Baru dalam tinjauan konsep *ihyā' al-mawāt* yang mencakup gambaran umum persebaran lahan di wilayah kecamatan Bandar Baru dan profil Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Pidie Jaya, Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Lahan Terlantar di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Peran Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya terhadap pemanfaatan lahan terlantar di Kecamatan Bandar Baru, Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya terhadap pemanfaatan Lahan Terlantar ditinjau menurut konsep *ihyā' al-mawāt*.

Bab empat, pada bab empat ini menjelaskan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.